

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kekerasan struktural yang melibatkan Israel dan Palestina merupakan sebuah isu yang telah berlangsung sejak lama dengan rangkaian kekerasan yang bereskalasi setiap tahunnya. Hingga kini, konflik ini belum menemukan titik terang dan terus menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak, seperti jatuhnya banyak korban jiwa dari masyarakat sipil di Gaza, terutama perempuan sebagai pihak yang paling terdampak. Dalam situasi konflik ini, perempuan Palestina mengalami berbagai penindasan seperti kekerasan militer, pembatasan ruang hidup, maupun ketimpangan sosial yang diperkuat oleh sistem patriarki (UN Women, 2021). Kompleksitas tersebut menggambarkan bahwa perempuan Palestina tidak hanya menghadapi kekerasan serta diskriminasi berbasis gender, tetapi juga ketidakadilan yang berasal dari kenyataan bahwa mereka hidup di bawah penjajahan dan kehilangan kedaulatan atas kehidupannya sendiri. Situasi ini kemudian menjadi perhatian dari kelompok feminis internasional yang mendorong solidaritas lintas batas bagi perempuan Palestina, seperti Sisters Uncut.

Sisters Uncut merupakan sebuah kolektif feminis yang berbasis *direct-action* dan berfokus dalam menentang kekerasan berbasis gender maupun kekerasan negara. Didirikan di Inggris pada tahun 2014, Sisters Uncut merupakan sebuah kelompok yang berakar dari UK Uncut, sebagai strategi perlawanan

terhadap kebijakan penghematan (*austerity*) pemerintah Inggris yang lebih berfokus dalam memerjuangkan hak perempuan yang terdampak (Ishkanian & Saavedra, 2019). Sisters Uncut bersifat inklusif dengan sistem keanggotaan yang tidak kaku, bahwa mereka bersedia menerima siapapun yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan untuk tujuan pengorganisasian politik, termasuk para lokal maupun migran di Inggris yang menjadi target utama Sisters Uncut dalam memerjuangkan hak-hak perempuan. Dalam beroperasi, Sisters Uncut menekankan pada prinsip feminisme interseksional, yang mengakui bahwa penindasan perempuan tidak hanya terjadi dalam konteks gender tetapi juga melibatkan faktor-faktor seperti ras, kelas, dan nasionalitas (Sisters Uncut, n.d). Prinsip inilah yang kemudian memicu ekspansi advokasi Sisters Uncut melampaui isu domestik, dan membuat mereka terlibat dalam berbagai gerakan solidaritas lintas batas di luar Inggris.

Perluasan gerakan yang dilakukan oleh Sisters Uncut juga tercermin melalui keterlibatannya dalam berbagai aksi solidaritas lintas batas negara, salah satunya dalam gerakan #FreeAlaa yang berfokus dalam perjuangan Laila Soueif, seorang aktivis perempuan asal Mesir yang melakukan aksi mogok makan di Kairo untuk menuntut pembebasan putranya, Alaa Abd El-Fattah, yang merupakan tahanan Mesir karena aktivitas politiknya (Wintour, 2025). Dalam pembelaan terhadap kasus ini, Sisters Uncut mengangkat perjuangan Laila sebagai ibu yang seringkali menjadi korban utama dari kekerasan negara dan menyoroti bahwa perjuangan melawan penjara tidak dapat dipisahkan dari upaya melawan kekerasan negara terhadap tubuh perempuan dan hak untuk hidup (Sisters Uncut, 2025). Dalam

melakukan aksi solidaritasnya, Sisters Uncut bergerak secara serentak bersama negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Swedia, Lebanon, Tunisia, Italia, Prancis, dan sebagainya (Alaa, 2025). Melalui unggahan kampanye solidaritas di media sosial, Sisters Uncut menunjukkan bahwa advokasi mereka melampaui isu-isu lokal di Inggris, dan menekankan bahwa praktik penindasan negara, khususnya melalui sistem penjara dan penahanan politik, juga merupakan bagian dari isu-isu feminisme yang perlu diperjuangkan. Hal ini juga tercermin dalam dukungan mereka terhadap perempuan Palestina, di mana Sisters Uncut secara aktif membangun solidaritas transnasional dalam isu ini.

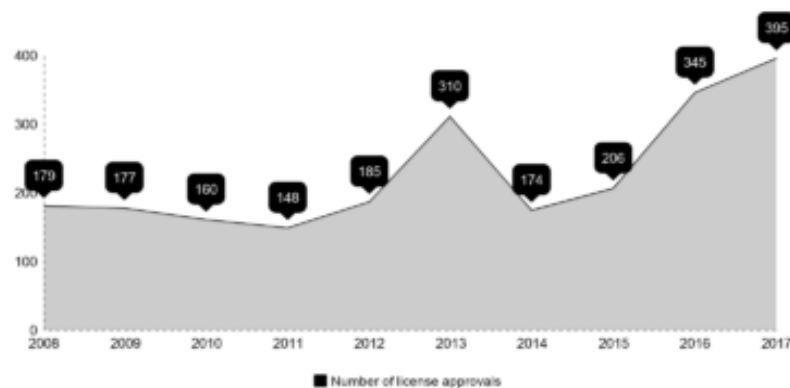


Gambar 1. 1 Peta persebaran gerakan #FreeAlaa di berbagai negara yang diikuti oleh Sisters Uncut

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Meskipun begitu, sebagian besar gerakan sosial yang dilakukan oleh Sisters Uncut dilakukan di Inggris. Selain karena merupakan tempat pendirian serta operasional Sisters Uncut, gerakan sosial yang mereka lakukan memang diarahkan

kepada pemerintah Inggris. Hal ini disebabkan oleh kontribusi secara tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, dimana mereka diketahui telah mempersenjatai serta memelihara hubungan diplomatik dengan Israel dan dianggap telah memberatkan penderitaan yang dirasakan oleh perempuan Palestina (Murphy & Spencer, 2025). Berdasarkan data dari (AOAV, 2018), sebanyak 2.279 lisensi ekspor senjata militer Inggris telah disetujui ke Israel dalam kurun waktu 2008-2017.



Gambar 1. 2 Jumlah Lisensi Ekspor Senjata Militer Inggris ke Israel yang disetujui (2008–2017)

Sumber: (AOAV, 2018)

Oleh karena itu, dengan penekanan yang diarahkan kepada pemerintah Inggris, Sisters Uncut berharap dapat mengembalikan tekanan tersebut kepada Israel agar dapat menghentikan penindasan terhadap perempuan Palestina, yang mencerminkan pola advokasi transnasional yang dikenal sebagai *boomerang pattern*. Maka, sekalipun tidak terjadi interaksi langsung antara Sisters Uncut dengan masyarakat Palestina, mereka mendasari perjuangannya dengan melihat perempuan Palestina sebagai kelompok yang mengalami kekerasan berbasis gender

serta kekerasan negara yang dilakukan oleh Israel, yang selaras dengan prinsip feminisme interseksional yang mereka anut.

Pada penelitian terdahulu, (Sharoni, Abdulhadi, & Al-Ali, 2015) melihat bahwa penderitaan perempuan Palestina merupakan bentuk penindasan berlapis, tetapi tulisannya lebih menekankan kepada peran para akademisi sebagai bagian dari aktor transnasional yang dapat memperkuat solidaritas terhadap perempuan Palestina. Sementara itu, (Abu-Ayyash, 2015) membahas tentang kelompok Palestine Solidarity Movement (PSM) di Inggris dan Irlandia yang menggunakan platform Twitter sebagai media kampanye, tetapi belum berfokus kepada gerakan organisasi feminis *grass-root*, seperti Sisters Uncut. (Farkhani & Bagheri, 2025) mengkaji mengenai aktivisme pro-Palestina di Inggris, tetapi belum menyoroti isu perempuan secara spesifik. Penelitian tentang Sisters Uncut sendiri, seperti (Ishkanian & Saavedra, 2019) masih terbatas pada dinamika internal komunitas mereka. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi advokasi Sisters Uncut dalam perlindungan perempuan Palestina melalui kerangka *Transnational Advocacy Network*.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat beserta *research gap* yang ditemukan, peneliti merumuskan masalah sebagai dasar dari penelitian ini berupa “Bagaimana Strategi Advokasi Gerakan Sosial Komunitas Feminis ‘Sisters Uncut’ terhadap Perlindungan Perempuan di Palestina pada Tahun 2021-2025?”.

1.3 TUJUAN

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum merupakan penelitian untuk memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi advokasi yang dilakukan oleh Sisters Uncut dalam kaitannya dengan perlindungan Perempuan Palestina pada tahun 2021-2025.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1 *New Social Movement*

New Social Movement merupakan sebuah teori yang muncul sebagai alternatif dalam menanggapi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh pendekatan Marxisme klasik dalam memahami perubahan sosial dan dinamika gerakan sosial (Buechler, 1995). Gerakan sosial baru menitikberatkan pada beberapa poin penting yang menjadi pembeda dengan teori gerakan sosial sebelumnya, salah satunya bahwa ia tidak berfokus kepada sistem politik sepenuhnya. Pada dasarnya, teori ini tidak berorientasi pada penaklukan kekuasaan politik atau aparatus negara, tetapi lebih kepada kontrol atas lapangan otonomi atau kemandirian terhadap sistem (Melucci, 1980). Gerakan sosial baru tidak

menggunakan taktik lama yang menggunakan model politik kepartaian ataupun model serikat buruh, tetapi lebih kepada taktik dan pengorganisasian yang disruptif untuk mendapatkan atensi publik dan biasanya menggunakan cara yang tidak kaku dan bersifat mengalir. Partisipan dalam gerakan sosial baru tidak hanya diisi oleh satu golongan tertentu, tetapi dari berbagai latar belakang sosial yang tak terbatas dan disatukan oleh ideologi yang sama (Pichardo, 1997). Oleh karena itu, fokus dalam gerakan sosial baru juga berpusat pada perubahan-perubahan yang lebih plural, seperti isu identitas, gaya hidup, dan budaya, salah satunya ialah feminisme.

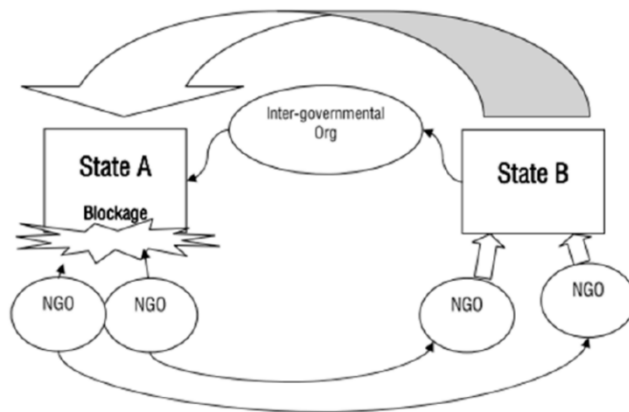
1.4.2 *Intersectional Feminism*

Intersectional Feminism merupakan sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Kimberle Crenshaw dalam tulisannya *Mapping the Margins*. Pada awalnya, konsep ini merupakan sebuah kritikan terhadap pendekatan feminisme liberal yang cenderung berpusat pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah dan seringkali mengaburkan campur tangan dari dimensi identitas lain yang juga berperan dalam kekerasan yang dialami oleh perempuan. Maka dari itu, konsep ini menyoroti tentang penindasan yang seringkali dialami oleh perempuan yang berasal dari kelompok minoritas, yang menyangkut ras, gender, kelas, dan seksualitas, serta bagaimana penderitaan yang dialami oleh perempuan merupakan hasil dari persilangan hal-hal tersebut yang berlapis dan saling beririsan (Crenshaw, 1991). Sementara itu, (Collins & Bilge, 2020) memperluas pemahaman mengenai *intersectional feminism* dengan menyoroti tantangan penggunaan konsep ini dalam konteks transnasional dengan menegaskan bahwa tidak seharusnya interseksionalitas hanya menjadi wacana keberagaman tanpa mempertahankan

fungsi kritisnya terhadap struktur kekuasaan. Interseksionalitas seharusnya tetap berperan sebagai alat analisis politik yang mempertanyakan bagaimana sistem dominasi seperti rasisme, seksisme, kolonialisme, dan imperialisme bekerja secara global. Dengan demikian, *intersectional feminism* tidak hanya merefleksikan mengenai keragaman identitas perempuan, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka analisis kritis dalam membaca ketidakadilan struktural terhadap perempuan, baik dalam konteks domestik maupun transnasional.

1.4.3 Transnational Advocacy Network

Transnational Advocacy Network merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh (Keck & Sikkink, 1998) dalam salah satu bukunya, *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Menurut (Keck & Sikkink, 1998), *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan sekelompok aktor yang memiliki nilai, norma, serta wacana yang sama dan kemudian saling bertukar informasi dan bekerja sama dalam isu-isu yang bersifat internasional. Aktor-aktor kunci yang biasanya terlibat dalam jaringan advokasi meliputi organisasi non-pemerintah (LSM), aktor internasional, gerakan sosial lokal, lembaga donor atau yayasan, media, organisasi keagamaan, maupun lembaga pemerintah. Dalam TAN, jaringan advokasi transnasional digerakkan oleh tiga faktor utama, yaitu *boomerang pattern*, aktivis yang berperan sebagai individu kunci yang mendorong munculnya jaringan dengan menginisiasi kampanye lintas batas, dan organisasi internasional maupun konferensi yang menyediakan ruang pertemuan strategis bagi terhubungnya berbagai aktor dalam jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1998).



Gambar 1. 3 *Boomerang pattern* dalam Transnational Advocacy Network (TAN)

Sumber: (Keck & Sikkink, 1998)

Menurut (Keck & Sikkink, 1998), jaringan advokasi transnasional biasanya terlibat dalam isu-isu di mana saluran komunikasi antara kelompok domestik dan pemerintahnya terhambat, diblokir, atau tidak efektif dalam menyelesaikan konflik. Kondisi ini memicu terbentuknya *boomerang pattern*, yaitu saat kelompok domestik yang sebelumnya tidak mampu dalam menuntut kebutuhan mereka dari pemerintah, kemudian mengaktifkan jaringan advokasi, di mana anggota jaringan tersebut memberikan tekanan kepada Negara B, yang selanjutnya akan menyalurkan tekanan kembali kepada Negara A. Melalui mekanisme ini, jaringan advokasi dapat memperkuat posisi kelompok domestik dengan meningkatkan tekanan eksternal yang terkoordinasi, sehingga dapat mendorong pemerintah di Negara A agar mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan dan aspirasi dari kelompok domestik tersebut (Keck & Sikkink, 1998).

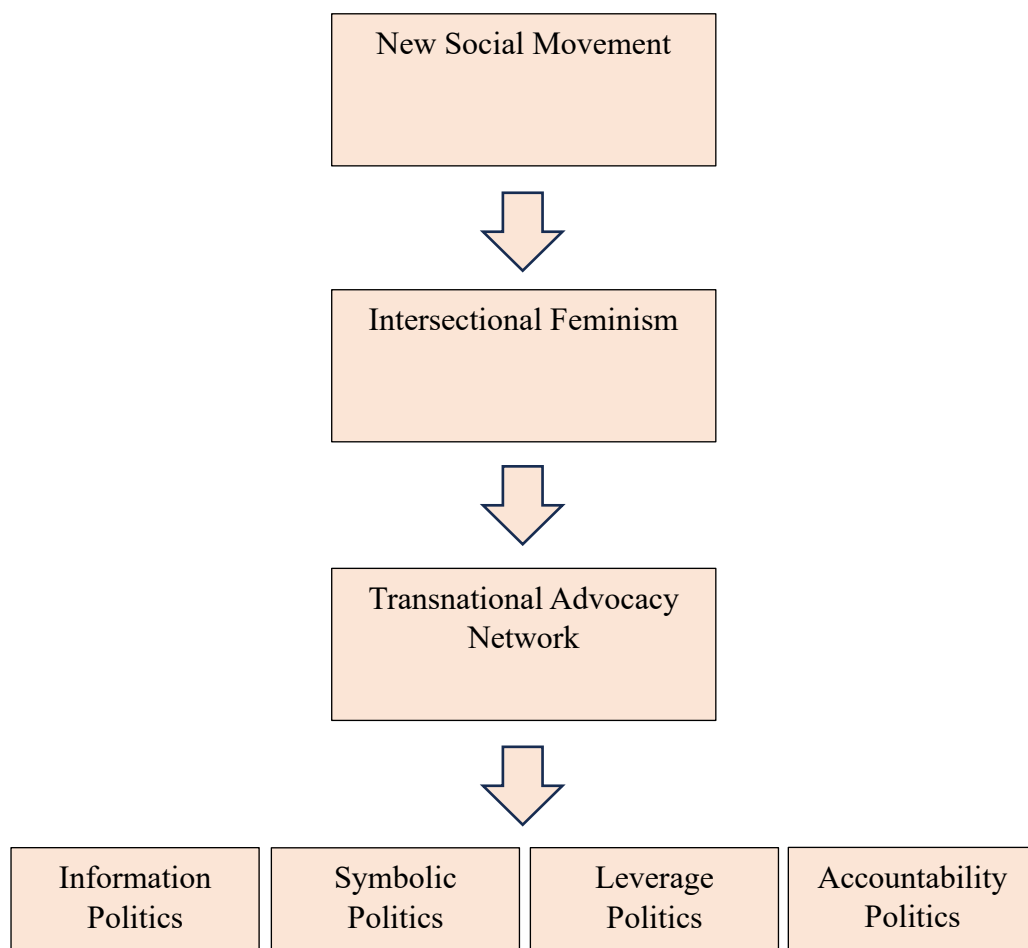
Sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh jaringan advokasi merupakan sebuah bentuk persuasi, sosialisasi, dan penekanan isu yang tidak terlepas dari

unsur konflik. Dalam hal ini, jaringan advokasi menggunakan berbagai taktik yang terbagi ke dalam empat bentuk utama, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics* (Keck & Sikkink, 1998). *Information politics* merupakan kemampuan dalam menyebarkan informasi secara cepat dan kredibel, serta mendistribusikannya ke dalam *platform* yang akan menghasilkan eksposur terbesar, seperti melalui aksi turun ke jalan, kampanye di sosial media, maupun liputan media. Sementara itu, *symbolic politics* merupakan kemampuan dalam menggunakan simbol, tindakan, atau narasi untuk melakukan *framing* terhadap situasi tertentu dengan bahasa yang mudah dipahami publik untuk menarik perhatian dari audiens luar lintas batas negara, seperti protes simbolik, penggunaan tagar di media sosial, hingga penggunaan atribut aksi yang mewakili isu.

Selain itu, terdapat *leverage politics* yang merupakan kemampuan dalam melibatkan aktor-aktor berpengaruh untuk menekan situasi di mana anggota jaringan yang lebih lemah tidak memiliki pengaruh langsung melalui dua cara, yaitu *material leverage* dan *moral leverage*. *Material leverage* merujuk pada strategi untuk menekan pihak target dengan mengaitkan isu yang diperjuangkan dengan sumber daya ekonomi atau militer, seperti melalui ancaman penghentian bantuan, sanksi ekonomi, atau kampanye boikot. Sementara itu, *moral leverage* dilakukan dengan usaha mengekspos pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara ke dalam ruang publik internasional yang disebut sebagai *mobilization of shame*, yang bertujuan untuk memberikan tekanan reputasional kepada para aktor sehingga dapat mendorong perubahan perilaku atau kebijakan, seperti melalui publikasi laporan pelanggaran, penyebaran dokumentasi visual, atau kampanye publik yang

menciptakan kecaman internasional. Terakhir, terdapat *accountability politics* yang merupakan upaya dalam memastikan bahwa aktor yang menjadi target advokasi mematuhi dan konsisten terhadap prinsip-prinsip yang telah mereka sepakati, seperti dengan tuntutan pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai tidak konsisten dengan pernyataan aktor tersebut sebelumnya (Keck & Sikkink, 1998).

1.5 SINTESA PEMIKIRAN



Gambar 1. 4 Sintesa Pemikiran

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan bagan sintesa pemikiran yang telah dipaparkan di atas, penulis menggunakan teori *New Social Movement* (NSM) untuk memahami karakteristik

gerakan sosial kontemporer yang tidak hanya berfokus pada isu ekonomi, tetapi juga isu identitas dan keadilan sosial, termasuk feminisme. Teori *Intersectional Feminism* digunakan untuk mengidentifikasi kompleksitas penindasan kepada perempuan yang didasari oleh beberapa hal yang berlapis dan saling beririsan, seperti ras, gender, dan kolonialisme. Sebagai kerangka analisis utama, penulis menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) untuk menjelaskan bagaimana jaringan advokasi beroperasi dalam konteks transnasional. Dalam teori ini, terdapat empat bentuk strategi utama yang digunakan oleh jaringan advokasi, seperti *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, yang menjadi acuan dalam memahami pola kerja jaringan advokasi lintas batas negara.

1.6 ARGUMEN UTAMA

Berdasarkan rumusan masalah serta sintesa pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berargumen bahwa Sisters Uncut melakukan gerakan sosial yang termasuk ke dalam karakteristik *New Social Movement*, menggunakan pendekatan *International Feminism*, kemudian mengimplementasikan berbagai strategi advokasi untuk perlindungan perempuan Palestina melalui kerangka *Transnational Advocacy Network* yang terdiri atas *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dalam *information politics*, Sisters Uncut menyebarkan informasi terkait kampanye mereka dengan aksi turun ke jalan yang dilakukan di beberapa jalan besar di London, mengunggah terkait filosofi dan teknis aksi secara konsisten pada Instagram dan X mereka @SistersUncut, memuat artikel atau laporan yang ditampilkan di *website* Sisters

Uncut, serta menggunakan pamflet maupun poster untuk memaksimalkan potensi rekognisi terhadap penindasan yang dialami oleh perempuan Palestina serta perjuangan mereka dalam melindungi kaum perempuan di sana. Sementara itu dalam *symbolic politics*, Sisters Uncut menggelar aksi simbolik, menggunakan *hashtag* #CeasefireNOW dan #StopArmingIsrael saat melakukan kampanye secara *online*, serta menggunakan atribut demonstrasi yang bernuansa Palestina untuk melakukan *framing* terhadap situasi yang terjadi agar mudah dicerna oleh audiens internasional.

Pada *leverage politics*, Sisters Uncut menjalankan strateginya dengan menekan pemerintah Inggris melalui kampanye #StopArmingIsrael dan seruan boikot produk yang mendukung Israel sebagai strategi *material leverage*, serta *moral leverage* melalui kerja sama dengan komunitas serta organisasi internasional untuk memberikan rasa malu kepada pemerintah Inggris agar dapat menghasilkan perubahan kebijakan luar negeri. Terakhir dalam *accountability politics*, Sisters Uncut menuntut pertanggungjawaban pemerintah Inggris yang dinilai turut melanggengkan penindasan terhadap perempuan di Palestina, walaupun mengklaim sebagai negara pro-perempuan melalui aksi dan postingan mereka yang ditujukan kepada pemerintah Inggris secara langsung.

1.7 METODE PENELITIAN

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif-deskriptif. Menurut (Leksono, 2013), penelitian kualitatif-deskriptif merupakan sebuah pendekatan

terhadap peristiwa yang menjadi obyek penelitian dan penemuannya diuraikan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan strategi advokasi Sisters Uncut dalam memerjuangkan perlindungan perempuan Palestina.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan waktu dari tahun 2021 hingga 2025, yang merujuk pada periode meningkatnya eskalasi konflik di Palestina dan gelombang aksi solidaritas yang muncul secara transnasional dari Sisters Uncut.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari serta memahami teori-teori yang relevan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi seperti buku-buku akademik yang membahas tentang *New Social Movement*, *Intersectional Feminism*, dan *Transnational Advocacy Network*, jurnal ilmiah yang mengkaji strategi advokasi gerakan feminis serta isu perempuan Palestina, laporan resmi seperti dokumen UN Women dan data dari lembaga internasional, serta *website* resmi dari Sisters Uncut. Seluruh sumber data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk memperkuat argumentasi serta gagasan dalam penelitian (Adlini, Dinda, Yulinda, & Chotimah, 2022).

1.7.4 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat disajikan dalam dua bentuk, yakni teks naratif yang berbentuk catatan lapangan dan matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan sampai menemukan yang terbaik (Miles & Huberman, 1994).

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I, merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metode penelitian dari judul yang sudah ditentukan “Analisis Strategi Advokasi Gerakan Sosial Komunitas Feminis ‘Sisters Uncut’ terhadap Perlindungan Perempuan di Palestina pada tahun 2021-2025”.

BAB II, merupakan bab yang berisi tentang analisis Sisters Uncut sebagai bagian dari *New Social Movement* (NSM) dan bagaimana Sisters Uncut menggunakan pendekatan feminisme interseksional sebagai dasar perjuangan mereka dalam mengadvokasi perempuan, termasuk dalam konteks solidaritas terhadap perempuan Palestina.

BAB III, merupakan bab yang berisi tentang kajian strategi advokasi yang digunakan oleh Sisters Uncut dengan menggunakan kerangka *Transnational Advocacy Network* (TAN) dari Keck dan Sikkink. Analisis difokuskan pada empat bentuk strategi: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Selain itu, bab ini juga membahas dampak dan hambatan dalam pelaksanaan gerakan-gerakan tersebut.

BAB IV, merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat menjadi refleksi serta pengembangan untuk peneliti selanjutnya.